

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat simpulan dan rekomendasi terkait hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Simpulan disini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Di lain sisi, simpulan dalam bab ini juga merupakan hasil pemaknaan dan penafsiran penulis terhadap hasil analisis temuan mengenai, “Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Kakao dari PT. Bajabang hingga PT. Pasir Ucing Timur di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2002-2024”. Selanjutnya dalam rekomendasi penelitian akan disajikan beberapa saran terkait temuan penelitian yang telah dilakukan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap dinamika kehidupan sosial ekonomi buruh perkebunan kakao dari masa PT. Bajabang hingga PT. Pasir Ucing Timur, dapat disimpulkan bahwa perubahan pengelolaan perusahaan telah membawa dampak yang cukup signifikan, baik dalam aspek struktural, kebijakan manajerial, maupun dalam relasi antara buruh dan perusahaan. Simpulan ini disusun dengan merujuk pada temuan-temuan yang telah dipaparkan secara mendalam pada Bab IV, dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam Bab I. Adapun simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

Pertama, Perkebunan kakao di Cipeundeuy memiliki akar sejarah yang kuat sejak masa kolonial, ketika wilayah Priangan menjadi pusat budidaya dan pengolahan kakao di Hindia Belanda. Kehadiran perusahaan induk N.V. Fransch-Nederlandsche Koloniale Cultuur Maatschappij mengelola lahan Bajabang dan Pasir Oetjing menunjukkan kesinambungan pengelolaan sejak era Agrarische Wet 1870 hingga pasca-nasionalisasi pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Namun, tidak lama kemudian, arah kebijakan bergeser dengan dibukanya kembali ruang bagi investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing tahun

1967. Dalam konteks itulah, lahan Bajabang dan Pasir Ucing kembali dikelola secara swasta, hingga akhirnya secara resmi berada di bawah PT. Bajabang pada tahun 2002.

Kedua, Perkembangan kondisi sosial ekonomi buruh di perkebunan kakao Cipeundeuy pada periode 2002–2024 tidak terlepas dari perubahan pola pengelolaan perusahaan, serta orientasi nilai yang tercermin dalam visi dan misi masing-masing entitas pengelola. Di masa PT. Bajabang, meningkatnya angka produksi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan: gaji tertunda, insentif dihapus, dan perlindungan sosial nyaris tak ada. Ketika harga kakao anjlok, merekalah yang menanggung beban paling besar, hingga berujung pada gelombang PHK massal dan gugatan hukum dari buruh sendiri. Namun dalam keterpurukan itu, muncul perubahan. PT. Pasir Ucing Timur tidak datang membawa lonjakan produksi, tetapi membawa pendekatan yang lebih manusiawi dengan menyediakan jaminan sosial, mempertahankan fasilitas, dan menjadikan buruh sebagai bagian dari komunitas, bukan sekadar angka produksi.

Ketiga, Dampak perubahan pengelolaan dari masa PT Bajabang hingga PT. Pasir Ucing Timur dalam aspek ekonomi, terjadi perbaikan signifikan pada sistem pengupahan, termasuk ketepatan waktu pembayaran, besaran gaji yang meningkat, dan pengurangan jam kerja harian yang lebih manusiawi. Dari sisi relasi sosial, pola hubungan antara manajemen dan buruh mengalami transformasi dari struktur yang kaku dan hierarkis menjadi lebih egaliter dan partisipatif, menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif dan saling menghargai. Dan dalam perlindungan kerja, kehadiran sistem kontrak yang jelas serta jaminan sosial seperti BPJS mencerminkan upaya perusahaan untuk memperkuat rasa aman dan stabilitas kerja bagi para buruh.

5.2 SARAN

Berdasarkan temuan dan simpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis untuk pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sistem kerja di sektor perkebunan, khususnya di Kabupaten Bandung Barat:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan dalam memperkaya kajian sejarah perkebunan, khususnya bagi para akademisi yang tertarik untuk mengembangkan studi lebih lanjut dengan tema serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, terutama sebagai materi pendukung dalam pembelajaran sejarah lokal bagi peserta didik jenjang SMA/SMK/MA, khususnya dalam Kompetensi Dasar 3.6 upaya Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal era Reformasi .
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran reflektif bagi para pengelola perkebunan dalam memahami dinamika sosial ekonomi buruh secara lebih menyeluruh. Melalui studi ini, perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada target produksi, tetapi juga menjadikan kesejahteraan buruh sebagai bagian penting dari strategi keberlanjutan. Meskipun saat ini telah terlihat adanya upaya perbaikan, seperti pemberian jaminan sosial dan peningkatan relasi kerja, penguatan komitmen terhadap hak-hak buruh tetap perlu dijaga agar tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan benar-benar dirasakan dalam praktik keseharian di lapangan.
3. Diharapkan pemerintah dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan buruh perkebunan, baik melalui program pemberdayaan maupun penegakan regulasi yang lebih tegas terhadap sistem pengupahan. Masih banyak buruh yang menerima upah di bawah standar tanpa memiliki akses untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, penguatan peran Dinas Ketenagakerjaan sangat diperlukan agar dapat memantau secara berkala dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja. Di sisi lain, dukungan terhadap sektor perkebunan juga perlu diperluas, khususnya melalui kebijakan yang menjamin akses terhadap pupuk bersubsidi dan bantuan produksi lainnya. Meskipun banyak perusahaan bersifat swasta, keluhan terhadap mahalnya biaya produksi, terutama harga pupuk yang tetap

menjadi persoalan umum. Diharapkan kedepannya ada kebijakan yang lebih inklusif dan transparan agar subsidi dapat diakses secara adil oleh seluruh pelaku perkebunan.